

Nama : Rahma Dwi Gishela

NPM : 2413031038

Kelas : 24B

“CSE STUDY TAK PERTEMUAN 9”

PT Lestari Mineral adalah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Indonesia. Dalam laporan keuangannya tahun 2024, perusahaan menggunakan pendekatan akuntansi konservatif dalam mengakui biaya lingkungan hidup jangka panjang yang berkaitan dengan reklamasi tambang.

Namun, perusahaan kemudian menghadapi tekanan dari investor luar negeri yang lebih menyukai laporan keuangan yang menunjukkan laba lebih tinggi. Pihak investor menyarankan agar perusahaan menggunakan pendekatan yang lebih agresif dalam pengakuan biaya, sesuai dengan interpretasi IFRS terbaru.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia sedang dalam proses merumuskan standar akuntansi nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan transparansi sosial, namun proses tersebut banyak dipengaruhi oleh tekanan politik dari berbagai asosiasi industri.

Pertanyaan:

1. Analisis perilaku manajemen PT Lestari Mineral dalam memilih kebijakan akuntansi konservatif. Apa motivasi perilaku tersebut? Apa potensi dampaknya terhadap stakeholders?
2. Jika Anda adalah akuntan perusahaan, bagaimana Anda menyikapi tekanan dari investor luar negeri yang mendorong perubahan kebijakan akuntansi? Apakah mengikuti keinginan investor bertentangan dengan prinsip etika profesi akuntan? Jelaskan.
3. Jelaskan bagaimana proses penetapan standar akuntansi dapat dipengaruhi oleh ekonomi politik, baik di tingkat nasional maupun global. Berikan contoh dari kasus ini dan dari realitas lain yang Anda ketahui.
4. Bandingkan pendekatan standard-setting berbasis prinsip (seperti IFRS) dengan pendekatan berbasis aturan (seperti GAAP). Dalam konteks Indonesia, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan? Jelaskan alasannya.

Jawab:

1. Pilihan PT Lestari Mineral untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang konservatif menunjukkan sikap hati-hari dalam menghadapi ketidakpastian biaya lingkungan jangka

panjang. Secara perilaku, keputusan ini bisa didasari oleh keinginan manajemen untuk menjaga reputasi, mengurangi risiko hukum, serta menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Namun, motivasi ini juga dapat dilihat sebagai upaya menghindari sorotan publik atau tekanan politik yang mungkin muncul jika perusahaan terlihat terlalu berorientasi pada laba. Dampaknya, laporan keuangan yang konservatif mungkin membuat laba terlihat lebih kecil, tetapi meningkatkan kepercayaan regulator, masyarakat, dan pihak yang peduli lingkungan.

2. Sebagai akuntan, menghadapi tekanan dari investor luar negeri yang ingin menaikkan laba dengan metode yang lebih agresif harus disikapi secara profesional. Mengikuti keinginan investor tanpa dasar yang kuat dapat melanggar prinsip etika profesi, khususnya prinsip integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Akuntan seharusnya menjelaskan bahwa perubahan metode hanya bisa dilakukan jika ada alasan yang sah secara teknis, bukan untuk tujuan manipulatif. Menuruti tekanan investor semata akan merusak keandalan laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.
3. Proses penetapan standar akuntansi sering dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan dari asosiasi industri yang mungkin ingin standar yang lebih longgar agar laba perusahaan terlihat tinggi. Di tingkat global, lembaga seperti IASB juga mendapat pengaruh dari negara dan korporasi besar yang ingin standar sesuai kepentingan. Misalnya, dalam penyusunan IFRS tentang instrumen keuangan, tekanan dari sektor perbankan sempat menunda penerapan aturan yang lebih ketat. Artinya, standar setting tidak murni teknis, tetapi juga hasil negosiasi antar kepentingan.
4. Pendekatan IFRS bersifat principle based, artinya menekankan pada substansi ekonomi dan pertimbangan profesional, sedangkan GAAP lebih rule based, yaitu sangat detail dan berbasis aturan spesifik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan principle based seperti IFRS lebih relevan karena memberi fleksibilitas dan memungkinkan pertimbangan profesional sesuai kondisi lokal, termasuk nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang sedang dikembangkan. Namun, tetap dibutuhkan pengawasan yang kuat agar fleksibilitas ini tidak disalahgunakan.